

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pola dasar pendukung untuk penelitian ini sebagai pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Tentunya penelitian terdahulu ini terkait dengan efektivitas suatu program. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian yakni sebagai berikut:

1. Rina Fitriana (2022). Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan penelitiannya yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Beras Daerah (Rasda) di Desa Ampukung dan Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Fokus penelitian antara lain faktor keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Berdasarkan dari analisis hasil wawancara dan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Beras Daerah (Rasda) di Desa Ampukung dan Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tingkat efektivitasnya dinilai masih rendah karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu keterlambatan datangnya bantuan yang disalurkan, kurang tepatnya sasaran penerima serta kurangnya kepuasan penerima terhadap bantuan

yang disalurkan. Hasil penelitian di atas ditemukan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saya tulis yaitu terletak pada judul dan teori yang dipakai. Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Campbeel J.P yang terdiri dari: 1) Keberhasilan Program, 2) Keberhasilan Sasaran, (3) Kepuasan TerhadapProgram, 4) Tingkat Input dan Output, 5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan teori efektivitas dari Budiani (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) yaitu: 1) Ketepatan Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan Program.

2. Aura Ziah Adinda (2021). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan penelitiannya yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gapong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”**. Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Fokus penelitian antara lain faktor ketepatan dalam menentukan jumlah penerima, ketepatan dalam menentukan harga, ketepatan dalam menentukan waktu, ketepatan-ketepatan sasaran, ketepatan administrasi dan ketepatan kualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gapong Seutui belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima BPNT padahal layak untuk menerima, tidak disiplin dalam proses penyaluran, masih terjadinya kekhilafan data,

serta kualitas barang yang kurang bagus. Kemudian dalam proses pemindah bukuan dari Kemensos ke rekening KPM masih sering terjadinya kemacetan dalam penyaluran. Serta selama pelaksanaan program banyak terdapat beberapa hambatan dan tantangan, seperti gangguan jaringan pada BRI Link masyarakat yang tidak patuh dengan arahan yang diberikan TSKS. Kesimpulan penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran BPNT dalam menanggulangi kemiskinan dalam bidang pangan masih kurang mampu karena masih tidak memenuhi indikator efektivitas. Hasil penelitian diatas ditemukan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aura Ziah Adinda dengan penelitian yang saya tulis yaitu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dipakai. Pada penelitian Aura Ziah Adinda menggunakan fokus penelitian Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator, yakni: 1) Ketetapan dalam menentukan jumlah penerima, 2) Ketetapan dalam menentukan harga, 3) ketetapan dalam menentukan waktu, 4) Ketetapan-ketetapan sasaran, 5) Ketetapan dalam administrasi, 6) Ketetapan kualitas. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan teori efektivitas dari Budiani (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) yaitu: 1) Ketepatan Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 3) Tujuan Program, 4) Pemantauan Program.

Tabel 3.1
Hasil Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Rina Fitria (2022)	Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Beras Daerah (Rasda) di Desa Ampukung dan Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran Beras Daerah (Rasda) di Desa Ampukung Dan Telaga Itar dinilai tingkat efektivitasnya masih rendah.	Sama-sama ingin mengetahui sejauh mana efektivitas program dan menggunakan metode kualitatif.	Teori dan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu berbeda dengan penulis.
2.	Aura Ziah Adinda (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gapong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Program (BPNT) di Gapong Seutui belum efektif.	Sama-sama ingin mengetahui sejauh mana efektivitas program dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Teori dan lokasi peneliti terdahulu berbeda dengan penulis.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, rancangan-rancangan besar. Perserikatan bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Menurut Dye kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik (Subarsono, 2005).

James Anderson (1984) memberikan penelitian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making*, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2006). Menurut Jones kebijakan terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

- 1) Goal atau tujuan yang diinginkan
- 2) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- 3) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 4) Efek, yaitu akibat dari program (baik sengaja atau tidak, primer atau sekunder). Dalam hal ini hubungannya komponen-komponen tersebut dengan tindakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan (Tangkiln, 2003).

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, Young dan Quinn yang dikutip oleh suharto (2010) menyatakan terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecah masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Untuk kebijakan publik memiliki hirarki yang cukup banyak namun demikian, Nugroho membagi jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti: Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
- 3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Pasalong, 2010)

c. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut Wiliam Dunn sebagaimana dikutip dari Budi Winarno adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar menilai apakah kebijakan publik yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif memiliki arti efek, akibat, pengaruh, atau membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan sasaran yang hendak dicapai itulah maka tujuan sebelumnya yang telah ditentukan akan mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan.

Menurut Dyah Mutiarin & Arif Zainudin (2014:96) mengatakan bahwa efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat dan cepat dengan pencapaian berhasil maupun gagal.

Mia Lasmi Wardiah (2016:244) mengatakan bahwa “efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*clien*”.

Ulber Silalahi (2017:416) mengatakan bahwa efektivitas adalah “kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas merujuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana”.

Menurut Steers (Sutrisno Edy, 2010:123) pada umumnya “efektifitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia dan perilaku seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja”.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.

b. Perspektif Efektivitas

Gibson (Mia Lasmi Wardiah, 2016:245) mengelompokkan efektivitas menjadi 3 (tiga) perspektif yaitu sebagai berikut:

- 1) Efektivitas individu. Efektivitas individu berada pada bagian dasar dalam konteks organisasi. Perspektif individu menekankan pada

penampilan setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterampilan, pengetahuan, kecakapan, sikap, motivasi dan tekanan atau stress.

- 2) Efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok adalah efektivitas yang terjadi karena adanya individu dan kelompok.
- 3) Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi tidak hanya kumpulan efektivitas individu dan kelompok, tetapi juga karena organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang kompleks. Efektivitas organisasi ditentukan juga oleh faktor-faktor seperti lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses dan iklim kerjasama.

Gambar 2.1

Perspektif Efektivitas



Gambar diatas menerangkan bahwa tanda panah yang menghubungkan tiap-tiap tindakan tidak berarti menunjukkan bahwa efektivitas individu dapat menyebabkan efektivitas kelompok. Begitupula efektivitas kelompok, tidak berarti menyebabkan efektivitas organisasi. Gambar panah itu hanya menunjukkan urutan belaka, sebab tiap-tiap efektivitas dapat dipandang sebagai variabel yang tergantung pada variabel lain, yaitu sebab-sebab dari efektivitas. Misalnya beberapa sebab dari efektivitas individu adalah ciri fisik, sifat, psikologis dan motivasi, yang juga dapat menyebabkan perbedaan dalam prestasi kerja di antara individu. Untuk hasil kerja kelompok, penyebabnya meliputi kepemimpinan kelompok, komunikasi dan sosialisasi. Sedangkan efektivitas organisasi adalah hasil dari sejumlah variabel, termasuk teknologi, kesempatan baik, keakraban perorangan, motivasi dan hambatan lingkungan.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Edy Sutrisno (2010:125), ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu:

- 1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi
- 2) Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan eksternal dan lingkungan internal
- 3) Karakteristik karyawan/pegawai
- 4) Kebijakan praktik manajemen

Jadi ada tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu:

- 1) Struktur ialah pembagian pekerjaan, pengelompokan spesialisasi, koordinasi dan sebagainya yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Teknologi ialah perbuatan, pengetahuan, teknik dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah *input* menjadi *output*, barang/jasa.
- 3) Lingkungan eksternal ialah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah atau tindakan suatu perusahaan atau organisasi dan proses internalnya.
- 4) Lingkungan internal ialah lingkungan organisasi yang berada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang khusus pada perusahaan atau organisasi.

- 5) Keterikatan karyawan ialah suatu kondisi, sikap, atau perilaku positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan perasaan semangat (*Vigor*), dedikasi (*dedication*) dan keasyikan (*absorption*) untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan organisasi.
- 6) Prestasi kerja ialah hasil yang dicapai atau yang diinginkan oleh semua orang dalam bekerja. Prestasi kerja untuk tiap-tiap orang tidaklah sama ukurannya karena manusia itu satu sama lain berbeda.
- 7) Kebijakan manajemen ialah suatu pernyataan dari standar perilaku yang diinginkan perusahaan atau prosedur yang bisa diterapkan di seluruh organisasi. Kebijakan ini menggambarkan tindakan pada karyawan di area kerjanya dimana mereka diberikan kebebasan dalam memutuskan bagaimana yang terbaik untuk dijalankan.

e. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Ukuran efektivitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan meinterpretasikannya. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai, sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas.

Menurut Cambell J.P, (Dyah Mutiarin dan Arif Zainudin, 2014:16) pengukuran efektivitas secara umum adalah:

1) Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

2) Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian pada aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Dalam hal ini merupakan tolak ukur efektivitas sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan tujuan yang akan dihasilkan.

Adapun menurut Sutrisno (2010) dilihat dari indikator efektivitas program terdiri dari:

- 1) Pemahaman program, yaitu realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar dapat berjalan dengan baik.
- 2) Ketepatan sasaran, yaitu sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan secara efektif.
- 3) Ketepatan waktu, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
- 4) Tercapainya tujuan, yaitu indikator tercapainya tujuan sendiri memiliki makna bahwa suatu program tertentu memiliki tujuan awal yang harus dipenuhi sesuai target yang telah ditentukan. Tercapainya tujuan apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.

- 5) Perubahan nyata, yaitu suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program.

Sedangkan menurut Budiani (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) efektivitas program dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu mengukur sejauhmana tingkat para peserta dalam pelaksanaan program tetap dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Pemantauan program, yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

3. Program Sembako

a. Pengertian Program

Secara umum program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program.

Tentang arti dari program terdapat beberapa pendapat dari para ahli (Dyah Mutiarin dan Zainudin, 2014:4-6) diantaranya:

- 1) Menurut Pariata Westra dkk mengatakan bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.
- 2) Menurut Sandang P. Siagian mengemukakan bahwa perumusan kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program.

Menurut Siagian program dapat diartikan menjadi dua istilah, yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implemetasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa dalam program terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- 1) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan;
- 2) Program terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan;
- 3) Program terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang harus melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah rumusan yang menggambarkan suatu pekerjaan yang

akan dilaksanakan berdasarkan petunjuk cara-cara pelaksanaannya, direalisasikan dari suatu kebijakan dalam kurun waktu relatif lama yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi serta melibatkan sekelompok orang.

b. Konsep Program Sembako

Program Sembako merupakan perkembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Seperti halnya program BPNT, program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk program Sembako, pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti program BPNT, namun komoditas lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Bantuan program sembako disalurkan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal kedepannya, program sembako diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

Bantuan Program Sembako adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan yang digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya untuk digunakan membeli bahan pangan di E-Warong. Namun, mulai dari tahun 2023 proses penyaluran dana tidak lagi melalui ke E-Warong akan tetapi sudah bisa ditarik melalui bank penyalur. Penggunaan E-Warong sekarang untuk memudahkan KPM mengambil dana dikarenakan lebih dekat daripada harus ke bank penyalur. Alat pembayaran elektronik untuk Bantuan Program Sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera yang disebut KKS. Indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/Bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/Bulan dan mulai Januari 2021 nilai bantuannya naik lagi menjadi Rp.200.000/KPM/Bulan.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM dengan menggunakan dana bantuan program adalah:

- 1) Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- 2) Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- 3) Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
- 4) Sumber vitamin dan mineral; sayur-mayur, buah-buahan.

c. Tujuan dan Manfaat Program Sembako

- 1) Tujuan Program Sembako adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
 - b) Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
 - c) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 2) Manfaat Program Sembako adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatnya ketahanan pangan di kalangan KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dalam peanggungan kemiskinan;
 - b) Menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
 - c) Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.
- d. Kriteria Penerima Program Sembako
- 1) Program Sembako diberikan kepada KPM program sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
 - 2) KPM program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari satuan alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahami untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Program Sembako adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Dalam pelaksanaan Progra Sembako ini cukup diharapkan oleh masyarakat dalam memenuhi kesediaan pangan yang layak. Dengan sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Oleh karena itu, keefektivan suatu program dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan. Efektif atau tidaknya suatu program Sembako tersebut diukur dengan indikator Efektivitas menurut Budiani (Pratiwi dan Nurcahyanto,2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

Selain itu dalam menunjang efektivitasnya Program Sembako maka perlu diketahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas tersebut. Oleh karena itu, penulis mengetahui bagaimanakah tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

